

522-4



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jl Soeharno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

## LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : BADAS - AK-3

Diterima Tgl: 4/2-13

No. Surat : UN. / 6 / BADAS AK-1 / 12

No. Agenda : 209

Tgl Surat : 30-1-13

Sifat :

Perihal - undangan, Jumat, 8-2-13

### Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
- .....

*- Untuk di hkn*

*→ sat. Ris smp      4/2-13  
    ↳ SPT smp      05  
                            01-13*

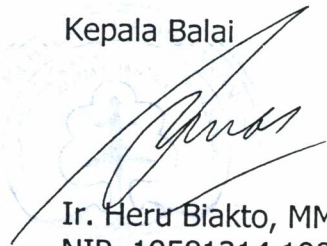


Lampiran Surat Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan  
Nomor : UN. 16 /BPDAS.AK-1/2013  
Tanggal : 30 Januari 2013

### Daftar Undangan

1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam.
3. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman.
4. Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman.
5. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang.
6. Kepala Dinas ESDM dan Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok.
8. Kepala Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan.
9. Kepala Bidang Wilayah Sumatera Barat, BBTNKS.
10. Kepala Subbag TU dan Kepala Seksi lingkup BPDAS Agam Kuantan.

Kepala Balai



Ir. Heru Biakto, MM.

NIP. 19581214 198803 1 001



522-4

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl Soekarno-Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : BPDAS-AK-3

Diterima Tgl: 8/4-13

No. Surat : 5.589/BPDAS-AK-3/13

No. Agenda : 725

Tgl Surat : 10-3-13

Sifat : -

Perihal - Identifikasi Potensi Pengembangan Hutan...

**Disposisi**

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
- .....

- Siapkan dan lampirkan kegiat  
Koleksi yang ada. 20/04/13.

→ str. ke. Silvi Melia periksa  
dalam lokasi yang ada  
di Survai 20/04/13

\* Agar di koordinasikan dgn BPDAS  
apa saja kegiatan yg dimaksud? .....



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL**  
**BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAM KUANTAN**  
Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Telp. (0751) 55864-53001 Fax. (0751) 53001 Po. Box 177 Padang

Nomor : S. 587 /BPDAS.AK-3/2013  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Identifikasi potensi pengembangan  
Hutan berbasis masyarakat lokal di  
Kabupaten / kota.

Padang, 18 Maret 2013

Kepada Yth.

( Daftar Terlampir )

Di –  
Tempat

Pada kegiatan DIPA Satker BPDAS Agam Kuantan tahun 2013 terdapat kegiatan Identifikasi potensi pengembangan hutan berbasis masyarakat lokal di kabupaten dan kota, untuk itu dalam waktu dekat BPDAS Agam Kuantan akan melaksanakan kegiatan dimaksud berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota yang menangani bidang Kehutanan.

Sehubungan dengan hal tersebut di mohon bantuannya untuk dapat menginformasikan jenis kegiatan mengenai potensi pengembangan hutan berbasis masyarakat lokal yang berada di wilayah kerja Bapak.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA BALAI,

  
**Ir. HERU BIAKTO, MM**  
NIP. 19581214 198803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal BPDAS PS
2. Direktur Bina Perhutanan Sosial



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL**  
**BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAM Kuantan**  
Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Telp. (0751) 55864-53001 Fax. (0751) 53001 Po. Box 177 Padang

Lampiran Surat Kepala BPDAS Agam Kuantan

Nomor : S. 509 /BPDAS.AK-3/2013

Tanggal : 18 Maret 2013

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kehutanan ESDM Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang
3. Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman
4. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Pd. Pariaman
5. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam
6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
7. Kepala Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok

Kepala Seksi Kelembagaan DAS



**In. H. YENI FETRA.**  
**NIP : 19600607 198903 1 001**



522.4



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jl Soekarno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

## LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : BPDAS - AK - 2.

Diterima Tgl: 27/3-13

No. Surat : 5-651 / BPDAS - AK - 2 / 13

No. Agenda : 640

Tgl Surat : 22 - 3 - 13

Sifat : -

Perihal - Rencana calon areal kerja hutan Desa Sumbang, Tbn 2013.

### Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
- .....

Uth di hndah lanjut  
D 27/3 013.

→ Str. koni ~~re~~ kneka / gulam  
mutuh npru di persia  
kon sesuai target pang  
di <sup>himpun</sup> mutuh pas dan  
Pnsu 2p 20  
02 13.





# DEPARTEMEN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL  
**BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAM KUANTAN**  
Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Telp. (0751) 7055864-7053001 Fax. (0751) 7055864 Po Box 177 Padang

Padang, 27 Maret 2013

Nomor : S. 631 /BPDAS.AK-2/2013  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : **Rencana Calon Areal Kerja Hutan Desa Sumatera Barat, Tahun 2013**

**Kepada Yth;**  
( Daftar terlampir )  
di-

**T e m p a t**

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan fasilitasi proses penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan / Hutan Desa (HKm/HD) di BPDAS Agam Kuantan, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan HKm/HD dimaksudkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari dengan cara masyarakat setempat diberi akses dalam memanfaatkan sumber-sumber daya hutan di dalam kawasan hutan.
2. Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm/HD adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum diberi hak pengelolaan izin pemanfaatan, untuk Hutan Desa harus berada di dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.
3. Target HKm/HD pada wilayah kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan tahun 2013 adalah sebesar 12.000 Hektar.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bersama-sama dengan BPDAS Agam Kuantan dapat melakukan inventarisasi dan identifikasi, sosialisasi serta memfasilitasi permohonan calon lokasi areal kerja HKm/HD oleh kelompok masyarakat kepada Bupati/Walikota sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Balai,**  
  
**Ir. HERU BIAKTO, MM**  
NIP.19581214 198803 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di **PADANG**
2. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial di **JAKARTA**
3. Bupati/Wali Kota dalam Wilayah Kerja BPDAS Agam Kuantan di **TEMPAT**
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di PADANG

Lampiran Surat Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan  
Nomor : S. 631 /V/BPDAS.AK-2/2013  
Tanggal : 22 Maret 2013

Kepada Yth ;

1. Kepala Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kabupaten Pesisir Selatan di **PAINAN**
2. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Padang di **PADANG**
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hrtikultura, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Padang/Pariaman di **PARIAMAN**
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam di **LUBUK BASUNG**
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di **SIMPANG EMPAT**
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok di **KAYU ARO**

  
**Kepala Balai,**  
  
**Ir. HERU BIAKTO, MM**  
NIP.19581214 198803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**Jl Soekarno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti**

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : SEKDA .

Diterima Tgl: 03-05-13

No. Surat : 050/17/BAPPEDA/VI-2013

No. Agenda : 902

Tgl Surat : 2-05-2013

Sifat :

Perihal

Tindak Lanjut Sosialisasi Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Pasaman terpadu.

**Disposisi**

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
- .....

- Hutan hutan yg  
- hps Dapet lain

J. 6/5-13

522.4



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat Telp. (0753) 466169, 466170 Fax (0753) 466170  
SIMPANG AMPEK

Simpang Ampek, 02 Mei 2013

Nomor : 050/177 /BAPPEDA/V-2013  
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar  
Perihal : Tindaklanjuti Sosialisasi Penyusunan Rencana  
Pengelolaan DAS Pasaman Terpadu.

Kepada Yth, Sdr

*Kepala Dinas Kehutanan*

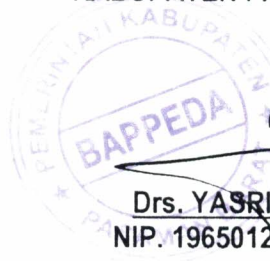
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 005/231/IV/PW-LH/Bappeda - 2013, Tanggal 29 April 2013 Perihal Undangan Sosialisasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pasaman Terpadu (Undangan Terlampir), maka diharapkan untuk dapat menghadiri acara tersebut dengan membawa **Daftar Isian Identifikasi Isu Pokok Dan Permasalahan Stakeholder Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pasaman Terpadu** yang telah disampaikan pada Acara Koordinasi Tanggal 20 s/d 21 Maret 2013,

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



*[Signature]*  
Drs. YASRI URIPSYAH  
NIP. 196501231991081001

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pasaman Barat sebagai pelaporan
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425 Padang  
<http://www.sumbar.go.id> E-mail : pde.sb@sumbar.go.id

Padang, 29 April 2013

Nomor... : 005/231/IV/PAW-LH/Bappeda 2013  
 Lampiran : 1 (satu) Berkas  
 Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth :  
 1. Bupati Pasaman  
 2. Bupati Pasaman Barat  
 3. Kepala SKPD Prov.  
 Sumbar (daftar terlampir)  
 di-  
 Tempat

Menindaklanjuti kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Pasaman Terpadu yang telah diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2013, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hasil kegiatan sosialisasi tersebut adalah Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS Pasaman Terpadu yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
2. Proses selanjutnya adalah pertemuan stakeholder dalam rangka menghimpun dan mengidentifikasi isu/permasalahan dengan metode Logical Framework Analisis (LFA). Untuk itu, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr untuk menghadiri pertemuan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:
  - Hari / Tanggal : Selasa-Rabu / 7-8 Mei 2013
  - Waktu : Jadwal terlampir
  - Tempat : Rocky Hotel  
Jln. Permindo No. 40, Padang
  - Acara : Rapat Konsultasi Identifikasi dan Verifikasi Masalah  
Pengelolaan DAS Pasaman Terpadu Prov. Sumbar Tahun 2013
3. Untuk itu, dengan hormat agar dapat menugaskan Kepala SKPD yang terkait untuk dapat menghadiri acara Rapat Konsultasi Identifikasi dan Verifikasi Masalah Pengelolaan DAS Pasaman Terpadu sesuai dengan daftar undangan terlampir.
4. Sebagai bahan untuk pelaksanaan kegiatan LFA, kami mohon kepada Bapak/Ibu/Sdr untuk terlebih dahulu mengisi Daftar Isian sebagaimana yang telah disampaikan pada Acara Sosialisasi Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Pasaman Terpadu tanggal 21 Maret 2013.
5. Akomodasi dan konsumsi untuk 1 (satu) orang peserta dari masing-masing instansi selama rapat berlangsung ditanggung oleh panitia.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Dr. H. ALI ASMAR, M.Pd  
 Pembina Utama Muda / NIP. 19580705 197903 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan PS Kementerian Kehutanan
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman
4. Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 005/231/IV/PAW-LH/Bappoda 2013  
Tanggal : 29 April 2013

**DAFTAR UNDANGAN RAPAT KONSULTASI IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI  
MASALAH PENGELOLAAN DAS PASAMAN TERPADU PROV. SUMBAR TAHUN 2012**

**Stakeholder Terkait :**

**A. Prov. Sumbar**

1. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat
6. Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumbar
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
9. Kepala Balai Wilayah Sungai V Sumatera Barat
10. Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan
11. WALHI Perwakilan Sumatera Barat
12. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat
13. Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat
14. Dr. Ir. Erigas Eka Putra, MS. (Anggota Dewan Sumber Daya Air Prov. Sumbar)
15. Kepala BMKG Provinsi Sumatera Barat

**B. Kabupaten Pasaman**

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman
2. Ketua Komisi yang Membidangi Lingkungan DPRD Kabupaten Pasaman
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman
6. Kepala Kantor LH Kabupaten Pasaman
7. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Pasaman
8. Kepala Kantor BPN Kabupaten Pasaman
9. Camat II Koto Kabupaten Pasaman
10. Camat Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
11. Camat III Nagari Kabupaten Pasaman
12. Camat Panti Kabupaten Pasaman
13. Ketua LKAAM Kabupaten Pasaman
14. Direktur PDAM Kabupaten Pasaman

**C. Kabupaten Pasaman Barat**

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat
2. Ketua Komisi yang Membidangi Lingkungan DPRD Kabupaten Pasaman Barat ✓
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat ✓
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ✓
5. Kepala Dinas Pertanian Tan. Pangan, Hortikultura & Peternakan Kab. Pasaman Barat ✓
6. Kepala Badan LH, Kebersihan & Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat ✓
7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat ✓
8. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ✓
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat ✓
10. Kepala Kantor BPN Kabupaten Pasaman Barat ✓
11. Camat Talamau Kabupaten Pasaman Barat ✓
12. Camat Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ✓
13. Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ✓
14. Camat Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ✓
15. Camat Sasak Ranah Pasiesie Kabupaten Pasaman Barat ✓
16. Ketua LKAAM Kabupaten Pasaman Barat ✓
17. Direktur PDAM Kabupaten Pasaman Barat ✓

**AGENDA ACARA RAPAT KONSULTASI IDENTIFIKASI  
DAN VERIFIKASI MASALAH PENGELOLAAN DAS PASAMAN TERPADU  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013**

***ROCKY HOTEL, 7 - 8 MEI 2013 - PADANG***

WAKTU	KEGIATAN	PEMBICARA/ NARASUMBER	Keterangan
<b>SELASA 7 MEI 2013</b>			
14.00 - 19.00	Chek In dan Registrasi Peserta		Panitia
19.00 - 22.00	Makan Malam		
<b>RABU 8 MEI 2013</b>			
08.45 - 09.00	Pembukaan - Lagu Indonesia Raya - D o a - Laporan Panitia		
09.00 - 09.15	Sambutan dan Sekaligus Pembukaan	Kepala BAPPEDA Prov. Sumbar	
09.15 - 09.30	<i>Coffe break</i>		
09.30 - 12.00	Diskusi Permasalahan DAS Pasaman Terpadu	Tim Ahli	
12.00 - 13.00	ISHOMA		
13.00 - 15.00	Diskusi Permasalahan DAS Pasaman Terpadu	Tim Ahli	
15.00 - 15.15	Penutupan	Kepala BPDAS Agam Kuantan	
15.15 - Selesai	Chek Out dan Peserta		



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl Soekarno-Hatta Komplek Pertanian Subomananti

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : BUPATI Pasbar.

Diterima Tgl: 18/6-13

No. Surat : 522 / 584 / BUP Pasbar / 13.

No. Agenda : 1170

Tgl Surat : 17-6-13.

Sifat : -

Perihal - Inventarisasi data dan pembentukan peraturan daerah...

**Disposisi**

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
- .....

- Untuk dipelajari dan siapkan data detail Data tercantum

→ Sr. Kiri Meleko Guno 18/6-13  
 Siipkan Administrasi pencaharian  
 Sekuritas Dns Pas-Bar 25/6  
 percek... 19/06-13.

18/6 2013. telah dikirim sesuai dengan  
 Tujuan di maksud.

f.





## BUPATI PASAMAN BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 29 Telp. (0753) 466262 Fax. (0753) 466170 Pasaman Baru – Simpang Ampek

Simpang Ampek, 17 Juni 2013

Nomor : 522/ ~~594~~ /Bup-Pasbar/2013  
 Lampiran : 1 (satu) lembar  
 Perihal : Inventarisasi Data dan Pembentukan  
 Peraturan Daerah mengenai  
 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  
 (DAS)

Kepada Yth;

Bapak Menteri Dalam Negeri  
 Republik Indonesia

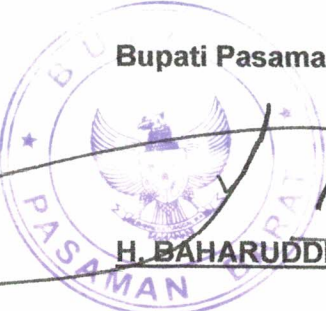

di –

Jakarta

Menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor.188.32/1703/SJ tanggal 2 April 2013 perihal sebagaimana tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa Kabupaten Pasaman Barat sampai saat ini belum lagi memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan matriks inventarisasi data pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pasaman Barat terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

  
**Bupati Pasaman Barat**  
  
**H. BAHARUDDIN R.**

**Tembusan :**

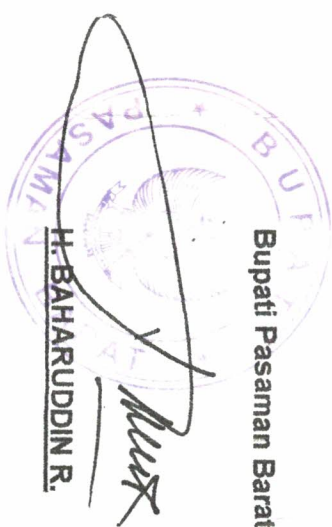
1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan di Padang
4. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Ampek

MATRIK INVENTARISASI DATA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

No.	Provinsi/Kab/Kota	Nama DAS	Provinsi/Kabupaten /Kota Terkait	Luas DAS (Ha)	Peruntukan DAS	Permasalahan DAS	Alternatif Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sumatera Barat/ Pasaman Barat	Masang Kiri	-	169.718,2	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan, PDAM.	Ilegal Meaning dan Sedimentasi	Penyuluhan dan Patroli rutin
2.	Pasaman Barat	Kinali	-	2,07	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan.	Erosi dan Sedimentasi	Penyuluhan dan Patroli rutin
3.	Pasaman Barat	Ampu	-	11.962,78	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan, PDAM.	Sedimentasi	Penyuluhan dan Patroli rutin
4.	Pasaman Barat	Pasaman	-	166.110,73	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan, PDAM, Obyek Wisata.	Ilegal Meaning, erosi dan sedimentasi	Penyuluhan, Patroli rutin dan pengerukan.
5.	Pasaman Barat	Sikiliang	-	73.434,92	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan.	Ilegal Meaning dan Sedimentasi	Penyuluhan, Patroli rutin dan pengerukan.
6.	Pasaman Barat	Batang Tamak	-	253,07	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan.	Sedimentasi	Penyuluhan dan Patroli rutin
7.	Pasaman Barat	Sibunian	-	12.649,01	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan, PDAM	Ilegal Meaning dan Sedimentasi	Penyuluhan dan Patroli rutin
8.	Pasaman Barat	Sikarbau	-	53.368,04	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan, PDAM, Obyek Wisata	Ilegal Meaning dan Sedimentasi	Penyuluhan dan Patroli rutin
9.	Pasaman Barat	Batahan	Sumatera Utara/ Mandailing Natal	307.042,66	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan, PDAM, Obyek Wisata.	Ilegal Meaning, perambahan hutan dan Sedimentasi.	Penyuluhan, Patroli rutin dan pengerukan.

Bupati Pasaman Barat

H. BAHARUDDIN R.





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

**Jl Soekarno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti**

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : Menteri dim negeri RI

Diterima Tgl: 0-5-13

No. Surat : 100-32 / 1703 / SJ

No. Agenda : 930

Tgl Surat : 2-4-13

Sifat : -

Perihal - Inventarisasi data dan pembentukan Peraturan Daerah ..

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
- .....

**Disposisi**

- Untuk di angkas data DMS  
 sesuai permintaan

→ str. Kari Mulya / 7/5-13  
 telah buat dan  
 peng di minta utu di  
 lakukan oleh 14/05-13



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Khatijah Dewantara No. 29 Telp. 907531 466169 Fax. 466170  
 Simpang Empat - Pasaman Barat

5

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat Dari : Menteri Dalam Negri RI	Diterima Tgl. : 9 MEI 2013
No. Surat : 188.32/1703/SJ	No. Agenda : 2697
Tgl. Surat : 9 April 2013	455

Perihal : Inventarisasi Data dan Pembentukan  
 Perencanaan Daerah mengenai Pengalokasian  
 Daerah ALIRAN SUNGAI (DAS)

Catatan : YB. Asisten F  
 Info ke Tekutana  
 7<sup>2</sup>/<sub>5</sub>13  
 Kabu Pem  
 Koordinasi / tembak ke  
 Rohut  
 9 3/5-13.

th. kram pua:  
 koordinasi &  
 jessikan ke Dinas  
 Keluaran.  
 03/18.  
 05



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 April 2013

Nomor : 188.32/1703/SJ  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Inventarisasi Data dan  
Pembentukan Peraturan Daerah  
mengenai pengelolaan Daerah  
Aliran Sungai (DAS)

Kepada  
Yth. 1. Para Gubernur  
2. Para Bupati/Walikota

di -

**Seluruh Indonesia**

**SURAT EDARAN**

I. Dasar

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

II. Memberitahukan bahwa :

1. Daerah aliran sungai (DAS) didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Yang saat ini masih kurang mendapat perhatian, sehingga mengurangi daya dukung DAS yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak sosial pada masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan penyebaran tanah longsor pada musim penghujan yang banyak menelan korban jiwa dan kekeringan pada musim kemarau, sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 perlu mengambil langkah konkrit terkait pengelolaan DAS.
2. Dengan terbentuknya pemekaran daerah Kabupaten/Kota, menyebabkan terjadinya pergeseran wilayah DAS, misalnya yang sebelumnya masuk di wilayah A dengan pemekaran menjadi wilayah B dan hal ini berlaku pula terhadap permasalahan yang berdampak sosial di wilayah DAS. Untuk itu diperlukan keakurasian data DAS dalam mengurai permasalahan dan mencari solusi terbaik dalam pengelolaannya.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diminta kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pemetaan dan inventarisasi data wilayah DAS serta permasalahan dengan mengirimkan data-data mengenai DAS seperti Nama DAS, Luas Wilayah DAS, Kabupaten/Kota yang terkait dengan DAS tersebut, Penataan Ruang DAS, lembaga/SKPD daerah yang menangani DAS dan permasalahan serta solusi dalam pengelolaan DAS di daerah, yang disampaikan dalam bentuk matriks (terlampir).
4. Terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu sebagai upaya dalam meningkatkan daya dukung DAS, diminta kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk segera menerbitkan **Peraturan Daerah** atau **Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota**.
5. Hasil inventarisasi data DAS dimaksud di kirim ke Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kebon Sirih No. 31 Jakarta Pusat, Telp. 021-3142142 ex.423, 425, fax.021-31926519, paling lambat Bulan Juni 2013.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Presiden RI, sebagai laporan;
2. Sdr. Menteri Kehutanan;
3. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup.

MATRIKS INVENTARISASI DATA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	PROVINSI/KABUPATEN /KOTA TERKAIT	LUAS DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	PERUNTUKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	PERMASALAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							



522.4

## BUPATI PASAMAN BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 29 Telp. (0753) 466262 Fax. (0753) 466170 Pasaman Baru – Simpang Ampek

Simpang Ampek, 17 Juni 2013

Nomor : 522/ ~~594~~ /Bup-Pasbar/2013  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Inventarisasi Data dan Pembentukan  
Peraturan Daerah mengenai  
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  
(DAS)

Kepada Yth;  
Bapak Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia

di –  
Jakarta

Menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor.188.32/1703/SJ tanggal 2 April 2013 perihal sebagaimana tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa Kabupaten Pasaman Barat sampai saat ini belum lagi memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan matriks inventarisasi data pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pasaman Barat terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Bupati Pasaman Barat



H. BAHARUDDIN R.

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan di Padang
4. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Ampek



MATRIK INVENTARISASI DATA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

No.	Provinsi/Kab/Kota	Nama DAS	Provinsi/Kabupaten /Kota Terkait	Luas DAS (Ha)	Peruntukan DAS	Permasalahan DAS	Alternatif Penyelesaian Masalah
1.	Sumatera Barat/ Pasaman Barat	Masang Kiri	-	169.718,2	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan, PDAM.	Illegal Meaninging dan Sedimentasi	Penyuluhan dan Patroli rutin
2.	Pasaman Barat	Kinali	-	2,07	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan.	Erosi dan Sedimentasi	Penyuluhan dan Patroli rutin
3.	Pasaman Barat	Ampu	-	11.962,78	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan, PDAM.	Sedimentasi	Penyuluhan dan Patroli rutin
4.	Pasaman Barat	Pasaman	-	166.110,73	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan, PDAM, Obyek Wisata.	Illegal Meaninging, erosi dan sedimentasi	Penyuluhan, Patroli rutin dan pengerukan.
5.	Pasaman Barat	Sikiliang	-	73.434,92	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan.	Illegal Meaninging dan Sedimentasi	Penyuluhan, Patroli rutin dan pengerukan.
6.	Pasaman Barat	Batang Tamak	-	253,07	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan.	Sedimentasi	Penyuluhan dan Patroli rutin
7.	Pasaman Barat	Sibunian	-	12.649,01	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan, PDAM	Illegal Meaninging dan Sedimentasi	Penyuluhan dan Patroli rutin
8.	Pasaman Barat	Sikarbau	-	53.368,04	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan, PDAM, Obyek Wisata	Illegal Meaninging dan Sedimentasi	Penyuluhan dan Patroli rutin
9.	Pasaman Barat	Batahan	Sumatera Utara/ Mandailing Natal	307.042,66	Irigasi, Kerambah Ikan, Persawahan, PDAM, Obyek Wisata.	Illegal Meaninging, perambahan hutan dan Sedimentasi.	Penyuluhan, Patroli rutin dan pengerukan.

Bupati Pasaman Barat

  
H. BAHARUDDIN R.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Sukomananti

Nomor : 522/053/DINHUT/2013  
Lamp. : 1 Hal  
Perihal : Laporan Penanaman Satu Milyar Pohon  
(OBIT)

**Sukomananti, 29 April 2013**

Kepada Yth :  
Kepala Balai Pengelolaan DAS  
Agam Kuantan  
di -  
**Padang**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Nomor: 796/V/BPDAS.AK-4/2013 tanggal 22 April 2013 perihal sama dengan pokok surat diatas, bersama ini kami sampaikan Laporan Penanaman Satu Milyar Pohon sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

4 Kepala Dinas Kehutanan

  
**Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si**  
NIP. 19621110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Arsip

Lampiran Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Nomor : 522/853/Dinhut/2013  
Tanggal : 29 April 2013

**LAPORAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON (OBIT)  
TAHUN 2012**

1.	Nama Pelaksana	: Dinas Kehutanan Pasaman Barat
2.	Waktu Penanaman	: Tanggal : 20 Bulan : Desember Tahun 2012
3.	Jenis Kegiatan	: RHL
4.	Nama Kegiatan	: Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2012
5.	Sumber Anggaran	: APBN
6.	Nama Anggaran	: DIPA BA 29 BPDAS Agam Kuantan
7.	Lokasi Penanaman	
	- Kecamatan	: Sungai Beremas
	- Nagari/Jorong	: Air Bangis/ Kampuang Padang Utara
8.	Titik Koordinat Penanaman	
9.	Jenis Tanaman	
	- Kayu-kayuan	: Mahoni, Ketaping, Nyamplung, Cemara Laut
	- MPTS	: -
10.	Jenis Bibit	: Mahoni : 1250 batang, Ketaping : 100 batang, Nyamplung : 100 batang, dan Cemara Laut : 150 batang
11.	Luas Penanaman	: 2,56 ha
12.	Dokumentasi Penanaman	: ada
13.	Penanggung Jawab Kegiatan	: Sri Rahayu, SP

Kepala Dinas Kehutanan

  
**Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si**  
NIP. 19621110 199103 1 005